

MANAJEMEN KINERJA BELANJA DAERAH : ANALISIS EFISIENSI DAN STRUKTUR ANGGARAN
DKI JAKARTA 2024

Eva Septiani, Imtiaz Mutaqin, Annisa Yalin Rahma, Jeremy Pandu Lokananta, Maulida Putri,
Muhammad Nopta Hibatulloh, Sarah Aqmarina
Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 64241248@bsi.ac.id

Abstrak

Kebijakan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri sekaligus menyajikan pelayanan publik yang prima. penelitian kuantitatif deskriptif ini bertujuan mengevaluasi kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dengan membedah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *audited* melalui analisis varians, tingkat penyerapan anggaran, dan rasio belanja operasi. Hasil studi menunjukkan bahwa penyerapan anggaran secara keseluruhan berjalan sangat baik mencapai 92,06%, dengan sisa anggaran (*favorable variance*) sebesar Rp 6.01 triliun. Secara rinci, belanja operasi terserap optimal hingga 95,66%. Namun, penyerapan belanja modal tertahan di angka 84,72% akibat kendala teknis dan rumitnya proses pengadaan barang atau jasa. Penyerapan anggaran dinilai memuaskan, struktur belanja DKI Jakarta masih menunjukkan ketimpangan yang cukup serius. Rasio belanja operasi menyentuh angka 84,20% (kategori kurang baik) karena didominasi oleh pengeluaran rutin seperti belanja pegawai serta barang dan jasa. Akibatnya, alokasi untuk belanja modal produktif atau investasi infrastruktur menjadi sangat terbatas, yakni hanya sebesar 15,80%. Berdasarkan temuan ini, Pemprov DKI Jakarta direkomendasikan untuk segera membenahi sistem pengadaan belanja modal dan melakukan restrukturisasi anggaran secara bertahap demi mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran.

Abstract

The fiscal decentralization policy demands local government autonomy in managing budgets to deliver excellent public services. This descriptive quantitative study aims to evaluate the regional expenditure performance of the Provincial Government of DKI Jakarta in 2024 by examining secondary data from the audited Budget Realization Report (LRA) through variance analysis, budget absorption ratios. The results indicate that overall budget absorption was excellent, reaching 92.06%, with a favorable variance of Rp 6.01 trillion. In detail, operational expenditure was optimally absorbed at 95.66%. However, capital expenditure absorption lagged at 84.72% due to technical obstacles and complex procurement processes. Although budget absorption is considered satisfactory, DKI Jakarta's spending structure still exhibits a significant imbalance. The operating expenditure ratio reached 84.20% (poor category) due to the dominance of routine expenses such as personnel, goods, and services. Consequently, the allocation for

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

productive capital expenditure or infrastructure investment is highly restricted at only 15.80%. Based on these findings, the Provincial Government of DKI Jakarta is recommended to immediately improve its capital expenditure procurement system and gradually restructure its budget to foster sustainable regional development.

Keywords: *Regional Expenditure Performance, Budget Realization Report, Budget Efficiency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, sekaligus meningkatkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat Dara Gendis (2021). Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Namun, implementasi desentralisasi fiskal juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan alokasi belanja antara kebutuhan operasional rutin dengan investasi pembangunan jangka panjang Mahmudi (2019). Kondisi ini sering mengakibatkan struktur belanja yang tidak optimal, di mana proporsi belanja operasi terlalu tinggi sementara belanja modal untuk investasi infrastruktur menjadi sangat terbatas. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan kualitas pembangunan jangka panjang, dan mengurangi kapasitas daerah dalam memberikan layanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD juga menjadi isu kritis di era reformasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melaporkan secara teratur bagaimana anggaran yang telah ditetapkan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Digdowiseiso (2023). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen resmi yang berisi informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki posisi strategis namun juga menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan pelayanan publik yang memerlukan anggaran operasional sangat besar untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan memberikan layanan kepada jutaan penduduk yang dinamis Utomo (2015). Selain itu, sebagai metropolitan yang terus berkembang, Jakarta juga memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memperbaiki kualitas lingkungan yang semakin kompleks.

Dinamika ekonomi global pasca-pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah. Pemulihan ekonomi memerlukan strategi fiskal yang cermat dan adaptif dari pemerintah daerah Fatimah & Nuryaningsih (2024). Fluktuasi pendapatan daerah, perubahan prioritas pembangunan, serta tantangan baru seperti perubahan iklim dan desentralisasi kebijakan pusat menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta. Melalui data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terbuka kesempatan untuk menganalisis kinerja belanja daerah DKI Jakarta secara komprehensif berdasarkan data yang telah terverifikasi.

Analisis terhadap LRA dapat mengungkap berbagai informasi penting seperti efisiensi pelaksanaan anggaran, keserasian antara perencanaan dan implementasi, identifikasi pos-pos belanja yang mengalami deviasi signifikan, serta pola alokasi belanja yang mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Melalui analisis varians belanja, tingkat penyerapan anggaran, dan rasio belanja operasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan DKI Jakarta. Hasil analisis ini tidak hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menganalisis kinerja belanja daerah di berbagai wilayah Indonesia. Digdowiseiso (2023) melakukan analisis kinerja anggaran dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja daerah menggunakan data panel dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perencanaan dan realisasi anggaran, dengan varians yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan kualitas perencanaan anggaran. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis agar tingkat pencapaian anggaran dapat lebih optimal.

Penelitian lain oleh Syamsuddin et al (2022) menganalisis kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat periode 2018-2020 dan menemukan bahwa tingkat efisiensi belanja cukup baik dengan rata-rata penyerapan anggaran di atas 90 persen. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi penghambat penyerapan anggaran di akhir tahun. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem administrasi keuangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran.

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada analisis varians belanja dan rasio efisiensi untuk periode sebelum tahun 2024, dan belum mendetailkan pola serta penyebab ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi aktual secara mendalam, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, sebagian besar kajian terdahulu hanya menggunakan satu pendekatan indikator kinerja, seperti rasio keuangan atau efisiensi semata, dan belum secara komprehensif membandingkan aspek varians, efisiensi, dan proporsi belanja operasi secara bersamaan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis data terbaru dari LRA *audited* tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan multi-dimensi yang meliputi analisis varians, tingkat penyerapan anggaran, dan rasio belanja operasi secara terintegrasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontemporer mengenai kinerja belanja daerah di era pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ditinjau dari varians anggaran belanja, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
2. Bagaimana kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
3. Bagaimana kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ditinjau dari rasio belanja operasional terhadap total belanja daerah, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
4. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perbaikan pengelolaan dan alokasi belanja daerah berdasarkan hasil analisis varians anggaran, tingkat penyerapan anggaran, dan rasio belanja operasional tahun 2024?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana varians belanja daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data LRA tahun 2024, dengan fokus pada identifikasi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual untuk setiap kategori belanja (operasi, modal, dan tak terduga), serta interpretasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan deviasi tersebut.
2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, dalam rangka mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin menghambat penyerapan anggaran khususnya pada belanja modal.
3. Bagaimana rasio belanja operasional terhadap total belanja daerah tahun 2024, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai struktur belanja dan orientasi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta mengevaluasi keseimbangan antara belanja yang bersifat konsumtif dengan belanja yang bersifat produktif/investasi.
4. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan alokasi APBD di masa mendatang, agar dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Penelitian

Penelitian memberi peluang bagi penulis untuk memperdalam analisis kinerja belanja daerah dengan pendekatan multi-dimensi serta mengasah keterampilan mengolah data keuangan publik dan menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Hasilnya melengkapi dan mengembangkan studi terdahulu dengan bukti empiris yang lebih mutakhir berbasis LRA 2024 dan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi peneliti masa depan, memperkuat pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bagi pembaca dan masyarakat. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah lain, temuan dan rekomendasi penelitian menyediakan evaluasi objektif kinerja belanja,

mengidentifikasi kelemahan penganggaran, serta menjadi bahan perbaikan kebijakan APBD dan praktik pengelolaan keuangan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memahami konsep manajemen kinerja belanja daerah, efisiensi anggaran, dan struktur APBD. Teori-teori yang relevan menjadi acuan dalam menganalisis efektivitas pengelolaan belanja daerah serta mengevaluasi struktur anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Halim (2018) menjelaskan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat estimasi pendapatan dan perkiraan belanja yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran melalui proses politik antara eksekutif dan legislatif. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, sekaligus instrumen kebijakan publik untuk mengkomunikasikan prioritas dan arah pembangunan daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, APBD dapat dipahami sebagai dokumen yang mengintegrasikan aspek teknis penganggaran dan kepentingan politik daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke berbagai urusan pemerintahan. APBD harus disusun dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan sebagaimana diamanatkan regulasi keuangan daerah, sehingga mampu menjadi instrumen utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Belanja Daerah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020) mengelompokkan belanja daerah ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebagai dasar klasifikasi penganggaran dan pelaporan. Halim (2018) mendefinisikan belanja daerah sebagai seluruh pengeluaran kas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang manfaatnya dinikmati dalam tahun tersebut dan tidak kembali lagi ke pemerintah daerah dalam bentuk aset yang dapat dimiliki kembali.

Dari definisi dan klasifikasi tersebut, belanja daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengonversi kapasitas fiskal menjadi program dan kegiatan nyata bagi masyarakat. Keseimbangan antara belanja operasi yang bersifat rutin dengan belanja modal yang bersifat investasi menjadi indikator penting kualitas pengelolaan keuangan; dominasi belanja operasi menunjukkan fokus pada pembiayaan kegiatan konsumtif, sementara porsi belanja modal yang memadai mengindikasikan orientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset layanan publik jangka panjang.

2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Indonesia (2010) mendefinisikan LRA sebagai laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggarannya dalam satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa LRA disusun dengan basis kas sehingga setiap transaksi diakui ketika kas diterima atau

dibayarkan, dan laporan ini berperan penting untuk menilai tingkat kepatuhan serta kinerja pelaksanaan anggaran.

Dengan dasar tersebut, LRA menjadi instrumen utama untuk membaca deviasi antara rencana dan pelaksanaan APBD, baik berupa kelebihan maupun kekurangan realisasi pada masing-masing pos anggaran. Informasi dalam LRA digunakan eksekutif untuk evaluasi internal, legislatif untuk fungsi pengawasan, dan masyarakat sebagai bukti akuntabilitas penggunaan dana publik, sekaligus dasar bagi perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran strategis yang melampaui sekadar dokumentasi keuangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sopanah et al (2023), akuntansi sektor publik tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data keuangan, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan pandangan ini, suari dan Sopanah et al (2023) menemukan bahwa seringkali terdapat kesenjangan antara potensi, anggaran, dan realisasi di pemerintah daerah, yang menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, menganalisis LRA bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang memahami sejauh mana lembaga publik mematuhi prinsip-prinsip tata kelola dan memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Secara empiris, kualitas realisasi anggaran mencerminkan kematangan sistem manajemen keuangan daerah. Rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian merupakan indikator tambahan yang menunjukkan keberlanjutan dan otonomi keuangan pemerintah daerah Mahmudi (2019). Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk memperluas kapasitas keuangannya dari waktu ke waktu, sedangkan rasio kemandirian mengukur sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Indikator-indikator ini secara kolektif memberikan gambaran holistik mengenai kesehatan keuangan dan kinerja tata kelola di tingkat daerah.

2.1.4 Analisis Kinerja Belanja Daerah

Digdowiseiso (2023) menjelaskan bahwa analisis kinerja belanja daerah perlu menggunakan berbagai indikator seperti varians anggaran, rasio keuangan, serta ukuran efisiensi dan efektivitas untuk menilai kelayakan penggunaan anggaran. Halim (2018) memandang kinerja belanja daerah sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang telah ditetapkan.

Andrews et al (2011) menekankan bahwa kinerja organisasi di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya keuangan, tetapi juga oleh kualitas manajemen, struktur eksternal. Perspektif ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja belanja daerah tidak seharusnya hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan juga mempertimbangkan seberapa efektif sumber daya publik dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah.

Mengacu pada kedua rujukan tersebut, analisis kinerja belanja daerah dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu analisis varians antara anggaran dan realisasi, analisis tingkat penyerapan anggaran sebagai indikator efisiensi pelaksanaan, dan analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja untuk melihat struktur alokasi belanja. Kombinasi ketiga indikator ini memberikan gambaran komprehensif apakah belanja daerah telah dikelola secara

efisien, efektif, dan seimbang antara kebutuhan rutin dan investasi pembangunan jangka panjang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai dasar untuk menggambarkan alur penelitian serta hubungan antara konsep dan variabel yang digunakan dalam menganalisis kinerja belanja daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran Laporan Realisasi Anggaran.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jacinda Labana K, Fitri Nurul Aftitah, Kamaliatun Hasanah, Nur Lailatul Hadi F.M (2025)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Di DKI Jakarta	Kuantitatif deskriptif menggunakan data LRA dari BPKP	Varians belanja tahun 2023 sebesar Rp338.089.335 (favorable variance) dengan tingkat penyerapan 98,85%. Rasio belanja operasi sebesar 98,08% dikategorikan kurang baik karena melebihi 80%.	Sama-sama menganalisis kinerja belanja daerah DKI Jakarta menggunakan LRA, dengan metode analisis varians belanja dan rasio belanja operasi.	Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2023, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2024. Penelitian terdahulu tidak menyertakan analisis tingkat penyerapan anggaran per kategori belanja secara rinci.
2	Ruqidul Hajah	Analisis Laporan	Deskriptif kualitatif	Tahun 2019: efektivitas	Sama-sama menggunakan	Objek penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Alhabsi, Nuwun Priyono, Risma Wira Bharata (2023)	Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021	menggunakan data LRA Kabupaten Magelang 2019-2021 dari BPPKAD	94,52% (kurang efektif), efisiensi 89,98% (cukup efisien). Tahun 2020: efektivitas 124,21% (sangat efektif), efisiensi 89,61%. Tahun 2021: efektivitas 103,71% (sangat efektif), efisiensi 87,89%.	analisis rasio keuangan dari data LRA untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada rasio efektivitas dan efisiensi.	berbeda (Kabupaten Magelang vs DKI Jakarta), periode berbeda (2019-2021 vs 2024), dan penelitian terdahulu tidak menganalisis varians belanja maupun rasio belanja operasi.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif Arif Rachman, Yochanan (2024) yang bertujuan menggambarkan kondisi faktual kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data numerik yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena relevan dengan karakteristik data keuangan yang bersifat terukur dan dapat diolah secara matematis untuk menghasilkan kesimpulan objektif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti memaparkan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengujian hipotesis kausalitas.

Paradigma positivistik menjadi landasan filosofis penelitian ini, di mana realitas kinerja keuangan daerah dipandang sebagai fakta objektif yang dapat diukur dan dianalisis menggunakan instrumen kuantitatif Arif Rachman, Yochanan (2024). Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi yang telah diaudit oleh lembaga independen, sehingga tingkat validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik penelitian deskriptif memungkinkan penyajian informasi secara sistematis mengenai kondisi aktual tanpa berupaya mencari hubungan sebab-akibat antar variabel.

Sifat penelitian ini adalah *ex-post facto*, artinya data yang dianalisis merupakan peristiwa yang telah terjadi dan tercatat secara historis Arif Rachman, Yochanan (2024). Peneliti tidak melakukan intervensi terhadap objek penelitian, melainkan menganalisis dokumen laporan keuangan yang sudah tersedia. Pendekatan semacam ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, di mana evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan catatan formal yang dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut Arif Rachman, Yochanan (2024), penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara faktual berdasarkan data numerik yang terukur.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2024 . Pemilihan DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan strategis sebagai ibu kota negara dengan kompleksitas pengelolaan keuangan tinggi dan volume anggaran signifikan, serta dinamika kebijakan fiskalnya yang sering menjadi *benchmark* bagi daerah lain. Periode penelitian mencakup 1 Januari hingga 31 Desember 2024, dipilih berdasarkan ketersediaan data terkini yang telah diaudit dan dipublikasikan resmi, serta mencerminkan kondisi pasca-pemulihan ekonomi dengan pola baru dalam alokasi dan realisasi belanja daerah di era transisi kebijakan fiskal. Fokus analisis diarahkan pada komponen belanja operasi (belanja pegawai dan barang/jasa) serta belanja modal karena memiliki porsi dominan dalam struktur APBD dan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur, dengan analisis komparatif antara anggaran dan realisasi sebagai inti pembahasan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan anggaran Jakarta (2025).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder kuantitatif berupa angka keuangan dari dokumen resmi pemerintah daerah yang telah ter-verifikasi dan diaudit, menjamin objektivitas karena peneliti tidak terlibat dalam pengumpulan data primer. Sumber data utama berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit BPK dan memiliki tingkat akurasi serta kredibilitas tinggi, dilengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk penjelasan kualitatif pos belanja dengan varians signifikan. Data pelengkap diperoleh dari publikasi resmi BPKD Provinsi DKI Jakarta mencakup dokumen APBD beserta perubahannya, laporan kinerja pemerintah daerah, dan RKPD, dengan triangulasi sumber data untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Seluruh data merupakan informasi publik yang dapat diakses melalui portal resmi pemerintah daerah maupun lembaga audit, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan penelitian akademik dan pengawasan publik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data dari dokumen resmi pemerintah, sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif yang mengandalkan data sekunder. Pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dokumen relevan dari Pemprov DKI Jakarta meliputi Laporan Realisasi Anggaran *audited* tahun 2024, Catatan atas Laporan Keuangan, peraturan daerah tentang APBD dan perubahannya, dengan verifikasi keaslian dari portal resmi atau publikasi sah. Data kuantitatif diekstraksi mencakup angka anggaran dan realisasi untuk setiap jenis belanja, rincian belanja operasi dan modal, kemudian diorganisir dalam format tabulasi dengan pencatatan cermat terhadap konsistensi satuan dan periode waktu. Validasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan laporan *audited* BPK sebagai rujukan utama jika ditemukan perbedaan angka, untuk meminimalkan risiko kesalahan data yang mempengaruhi hasil analisis.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

3.5.1 Analisis Varians Belanja

Analisis varians digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual yang tercapai. Pendekatan ini membantu mendeteksi pos-pos belanja yang mengalami deviasi signifikan, baik berupa efisiensi *underspending* maupun pembengkakan biaya *overspending*. Formula yang digunakan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Halim (2018) Mahmudi (2019) sebagai berikut:

Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Interpretasi hasil varians dilakukan dengan kriteria:

- Varians negatif (realisasi < anggaran) = Varians Menguntungkan (*Favorable Variance*), mengindikasikan efisiensi atau penghematan anggaran
- Varians positif (realisasi > anggaran) = Varians Tidak Menguntungkan (*Unfavorable Variance*), mengindikasikan pembengkakan atau perubahan kebijakan

Perhitungan varians dilakukan untuk setiap kategori belanja, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Analisis juga mencakup perhitungan persentase varians untuk memahami besaran deviasi relatif terhadap anggaran yang ditetapkan. Varians yang melebihi ambang batas tertentu (misalnya 10%) akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan implikasinya terhadap kinerja organisasi.

3.5.2 Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran mengukur seberapa besar proporsi anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan. Formula yang digunakan adalah:

Tingkat Penyerapan = $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$ Kriteria penilaian tingkat penyerapan anggaran mengacu pada standar yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Mahmudi (2019) Halim (2018):

- Sangat Baik : Penyerapan 90% - 100%
- Baik : Penyerapan 80% - 89%
- Cukup : Penyerapan 70% - 79%
- Kurang : Penyerapan < 70%

Analisis penyerapan anggaran tidak hanya dilihat secara agregat, tetapi juga dirinci per jenis belanja untuk mengidentifikasi kategori belanja yang mengalami kendala atau keberhasilan dalam implementasinya. Pola penyerapan sepanjang tahun juga dianalisis untuk mendeteksi apakah terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun, yang dapat mengindikasikan masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan.

3.5.3 Analisis Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis rasio belanja operasi bertujuan mengukur proporsi belanja yang bersifat rutin dan konsumtif dibandingkan dengan total belanja daerah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai struktur belanja dan orientasi kebijakan fiskal pemerintah daerah. Formula perhitungannya adalah:

Rasio Belanja Operasi = $(\text{Total Belanja Operasi} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$

Belanja operasi dalam konteks ini mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang bersifat rutin dan berulang setiap tahunnya. Kriteria penilaian rasio belanja operasi mengacu pada standar yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019) Halim (2018):

- Baik : Rasio < 60% (menunjukkan alokasi yang cukup untuk belanja modal)
- Cukup Baik : Rasio 60% - 80 % (proporsi seimbang)
- Kurang Baik : < 50%

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 mengalami dinamika yang cukup signifikan sebagai respons terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan perubahan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, total belanja daerah yang dianggarkan mencapai Rp75,64 triliun, dengan realisasi sebesar Rp69,63 triliun atau mencapai tingkat penyerapan 92,06 persen hingga 31 Desember 2024.

Struktur belanja daerah DKI Jakarta tahun 2024 didominasi belanja operasi yang mencerminkan karakteristik Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan biaya operasional tinggi, sementara belanja modal menunjukkan proporsi lebih kecil. Realisasi belanja menunjukkan pola konsisten dengan periode sebelumnya, namun terdapat deviasi signifikan antara perencanaan dan realisasi pada beberapa pos belanja yang menjadi fokus analisis kinerja belanja daerah.

4.2 Analisis Varians Belanja Daerah Tahun 2024

Analisis varians memberikan gambaran mengenai selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang terlaksana selama tahun anggaran 2024. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan varians untuk setiap kategori belanja daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4. 1 Analisis Varians Belanja Daerah Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	VARIANS (Rp)	% VARIANS	KATEGORI
A	BELANJA OPERASI	61.283.505.927.677	58.623.935.516.823	(2.659.570.410.854)	4,34%	Menguntungkan
1	BELANJA PEGAWAI	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	(841.225.481.173)	4,20%	Menguntungkan
2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.835.321.117.883	26.572.367.215.305	(1.262.953.902.578)	4,54%	Menguntungkan
3	BELANJA BUNGA	186.000.000.000	180.738.864.995	(5.261.135.005)	2,83%	Menguntungkan
4	BELANJA SUBSIDI	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	(444.960.494.664)	7,04%	Menguntungkan
5	BELANJA HIBAH	6.358.144.887.494	3.307.808.095.906	(50.336.791.588)	1,50%	Menguntungkan
6		3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	(54.832.605.846)	1,54%	Menguntungkan

	BELANJA BANTUAN					
B	BELANJA MODAL	12.989.055.827.469	11.004.785.255.543	(1.984.270.571.926)	15,28%	Menguntungkan
C	BELANJA TAK TERDUGA	1.365.518.170.267	-	1.365.518.170.267	100%	Menguntungkan
D	TOTAL BELANJA DAERAH	75.638.079.925.413	69.628.720.772.366	(6.009.359.153.047)	7,94%	Menguntungkan

Sumber: Data LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (diolah) Jakarta (2025)

Tabel ini disusun dengan cara membandingkan angka anggaran dan realisasi pada LRA 2024 kemudian dihitung selisih nominal *varians* dan persentasenya untuk setiap kategori belanja, sehingga terlihat besaran deviasi baik secara rupiah maupun relatif. Varians dengan tanda negatif diinterpretasikan sebagai realisasi yang lebih rendah dari anggaran dan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai varians menguntungkan *favorable*, karena menunjukkan adanya penghematan atau efisiensi terhadap pagu yang telah ditetapkan. Klasifikasi menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam analisis ini disusun peneliti berdasarkan konsep efisiensi anggaran dalam literatur kinerja keuangan daerah, lalu diaplikasikan pada data LRA DKI Jakarta 2024 untuk menilai kualitas pelaksanaan belanja.

Analisis per Kategori Belanja:

4.2.1 Varians Belanja Operasi

Belanja operasi mengalami varians sebesar Rp2,66 triliun atau 4,34 persen dari anggaran, dengan varians terbesar pada belanja barang dan jasa (Rp1,26 triliun atau 4,54%), belanja pegawai (Rp841,23 miliar atau 4,20%), dan belanja subsidi (Rp444,96 miliar atau 7,04%). Varians belanja barang dan jasa mengindikasikan adanya efisiensi pengadaan, penundaan kegiatan, atau proses pengadaan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Varians belanja pegawai relatif wajar mengingat sifatnya sebagai fixed cost, dengan selisih kemungkinan disebabkan pensiun, mutasi, atau perubahan status kepegawaian yang tidak terantisipasi. Varians belanja subsidi sebesar 7,04 persen mengindikasikan penyesuaian kebijakan atau efisiensi penyaluran subsidi. Sementara itu, belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan varians kecil (masing-masing 1,50% dan 1,54%), mengindikasikan pelaksanaan program bantuan yang baik sesuai rencana karena sifatnya yang rigid dan terikat komitmen pemerintah kepada penerima bantuan.

4.2.2 Varians Belanja Modal

Belanja modal menunjukkan varians yang paling signifikan di antara kategori belanja lainnya, yaitu sebesar Rp1,98 triliun atau 15,28 persen dari anggaran. Varians ini jauh lebih besar dibandingkan varians belanja operasi, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya realisasi belanja modal antara lain: keterlambatan proses tender dan pengadaan, perubahan desain atau spesifikasi teknis di tengah pelaksanaan proyek, kendala lahan atau perizinan, serta cuaca dan kondisi eksternal lainnya yang menghambat progress pekerjaan fisik.

Varians belanja modal yang tinggi perlu mendapat perhatian serius karena belanja jenis ini memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kapasitas pelayanan publik dan

pembangunan daerah. Rendahnya realisasi belanja modal dapat mengindikasikan bahwa target pembangunan infrastruktur tidak tercapai sepenuhnya, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kendala pelaksanaan belanja modal perlu dilakukan untuk perbaikan di periode anggaran berikutnya.

4.2.3 Varians Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga tidak mengalami realisasi sama sekali (0 rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,37 triliun. Kondisi ini sebenarnya merupakan hal yang positif karena mengindikasikan tidak adanya kejadian luar biasa atau bencana yang memerlukan penanganan darurat selama tahun 2024. Belanja tak terduga dialokasikan sebagai buffer untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan respon cepat dari pemerintah daerah.

Tidak direalisasikannya belanja tak terduga menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang relatif kondusif tanpa kejadian luar biasa yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di DKI Jakarta. Anggaran yang tidak terpakai ini kemudian menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berikutnya atau untuk meningkatkan cadangan kas daerah.

4.3 Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Tingkat penyerapan anggaran merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan tingkat penyerapan anggaran untuk setiap kategori belanja:

Tabel 4.2 Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN %	KATEGORI
A	BELANJA OPERASI	61.283.505.927.677	58.623.935.516.823	95,66%	Sangat Baik
1	BELANJA PEGAWAI	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80%	Sangat Baik
2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.835.321.117.883	26.572.367.215.305	95,46%	Sangat Baik
3	BELANJA BUNGA	186.000.000.000	180.738.864.995	97,17%	Sangat Baik
4	BELANJA SUBSIDI	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	92,96%	Sangat Baik
5	BELANJA HIBAH	6.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50%	Sangat Baik
6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46%	Sangat Baik
B	BELANJA MODAL	12.989.055.827.469	11.004.785.255.543	84,74%	Baik

C	BELANJA TAK TERDUGA	1.365.518.170.267	-	0%	-
D	TOTAL BELANJA DAERAH	75.638.079.925.413	69.628.720.772.366	92,06%	Sangat Baik

Sumber: Data LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (diolah) Jakarta (2025)

Tingkat penyerapan pada setiap jenis belanja dihitung dengan rumus realisasi dibagi anggaran dikalikan seratus persen, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori kualitatif (misalnya Sangat Baik, Baik) berdasarkan kriteria batasan persentase yang ditetapkan peneliti dengan merujuk praktik evaluasi kinerja keuangan daerah. Melalui penghitungan ini, penelitian tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mengubahnya menjadi indikator kinerja yang lebih informatif untuk menilai seberapa optimal alokasi anggaran mampu direalisasikan pada masing-masing pos belanja.

Analisis per Kategori Belanja:

4.3.1 Penyerapan Belanja Operasi

Belanja operasi mencapai tingkat penyerapan 95,66 persen, yang tergolong sangat baik. Hampir seluruh komponen belanja operasi menunjukkan tingkat penyerapan di atas 90 persen, dengan belanja hibah mencatat penyerapan tertinggi sebesar 98,50 persen, diikuti oleh belanja bantuan sosial 98,46% dan belanja bunga 97,17%. Tingginya tingkat penyerapan belanja operasi mengindikasikan bahwa kegiatan rutin pemerintahan dan program bantuan kepada masyarakat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang merupakan dua komponen terbesar dalam belanja operasi, masing-masing mencapai penyerapan 95,80 persen dan 95,46 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa untuk mendukung operasional pemerintahan berjalan dengan efektif. Belanja subsidi mencatat penyerapan terendah di antara komponen belanja operasi yaitu 92,96 persen, namun angka ini masih tergolong sangat baik dan mengindikasikan bahwa program subsidi kepada masyarakat atau perusahaan daerah telah terlaksana dengan optimal.

4.3.2 Penyerapan Belanja Modal

Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal menunjukkan tingkat penyerapan yang lebih rendah yaitu 84,72 persen, yang termasuk dalam kategori Baik namun belum mencapai kategori Sangat Baik. Rendahnya penyerapan belanja modal dibandingkan belanja operasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai pemerintah daerah di Indonesia, mengingat belanja modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan belanja operasional.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan belanja modal antara lain: (1) kompleksitas proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan tahapan tender, lelang, dan kontrak yang memakan waktu; (2) kendala teknis dalam pelaksanaan proyek seperti cuaca, ketersediaan material, dan tenaga kerja; (3) perubahan desain atau spesifikasi teknis yang memerlukan addendum kontrak; (4) masalah lahan dan perizinan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik; serta (5) kapasitas kontraktor yang terbatas dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditargetkan.

Meskipun demikian, tingkat penyerapan 84,72 persen masih dapat dikategorikan sebagai capaian yang baik, mengingat target minimal penyerapan anggaran yang biasanya ditetapkan pemerintah adalah 80 persen. Namun, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk meningkatkan penyerapan belanja modal di masa mendatang, mengingat pentingnya investasi infrastruktur bagi pembangunan daerah jangka panjang.

4.3.3 Implikasi Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi 92,06% memberikan beberapa implikasi positif bagi kinerja keuangan daerah. Pertama, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang disusun cukup realistis dan dapat dilaksanakan. Kedua, mengindikasikan kapasitas pelaksana yang memadai dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. Ketiga, mencerminkan sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong percepatan realisasi anggaran.

Namun demikian, tingkat penyerapan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas output dan outcome yang dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitatif (besaran penyerapan), tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitatif seperti kualitas infrastruktur yang dibangun, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi holistik semacam ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang diserap benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

4.4 Analisis Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Analisis rasio belanja operasi memberikan gambaran mengenai struktur belanja daerah dan orientasi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah:

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2024

KOMPONEN	BERDASARKAN ANGGARAN (Rp)	Berdasarkan Realisasi (Rp)
Total Belanja Operasi	61.283.505.927.677	58.623.935.516.823
Total Belanja Daerah	75.638.079.925.413	69.628.720.772.366
Rasio Belanja Operasi	81,03%	84,20%
Kategori	Kurang Baik	Kurang Baik

Sumber: Data LRA Provinsi DKI Jakarta (diolah) Jakarta (2025)

Perhitungan Rasio Berdasarkan Anggaran:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (61.283.505.927.677 / 75.638.079.925.413) \times 100\% = 81,03\%$$

Perhitungan Rasio Berdasarkan Realisasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (58.623.935.516.823 / 69.628.720.772.366) \times 100\% = 84,20\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 84,20 persen (berdasarkan realisasi), yang termasuk dalam kategori Kurang Baik sesuai dengan kriteria standar evaluasi. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 84%) anggaran belanja daerah terserap untuk membiayai kegiatan

operasional rutin, sementara hanya sekitar 15,80 persen yang dialokasikan untuk belanja modal sebagai investasi pembangunan infrastruktur dan aset daerah.

4.4.1 Komposisi Belanja Operasi

Untuk memahami lebih dalam mengenai struktur belanja operasi, berikut disajikan komposisi masing-masing komponen belanja operasi terhadap total belanja daerah:

Tabel 4.4 Komposisi Belanja terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA OPERASI	REALISASI (Rp)	%THD TOTAL BELANJA	PROPORSI DALAM BELANJA OPERASI
1	BELANJA PEGAWAI	19.190.554.701.043	38,15%	45,32%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.572.367.215.305	27,56%	32,74%
3	BELANJA BUNGA	180.738.864.995	8,44%	10,02%
4	BELANJA SUBSIDI	5.875.837.590.937	5,02%	5,96%
5	BELANJA HIBAH	3.307.808.095.906	4,75%	5,64%
6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.496.629.048.637	0,26%	0,31%
	TOTAL BELANJA OPERASI	69.628.720.772.368	84,20%	100%

Sumber: Data LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (diolah) Jakarta (2025)

Belanja barang dan jasa mendominasi struktur belanja operasi dengan porsi 45,32 persen dari total belanja operasi atau 38,15 persen dari total belanja daerah, mencerminkan kebutuhan operasional tinggi untuk menjalankan berbagai program pemerintahan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Belanja pegawai menempati urutan kedua dengan porsi 32,74 persen dari total belanja operasi atau 27,56 persen dari total belanja daerah, wajar mengingat jumlah ASN yang besar namun perlu dievaluasi untuk memastikan efisiensi. Belanja subsidi mencapai 10,02 persen dari total belanja operasi, sebagian besar untuk perusahaan daerah seperti Transjakarta dan PDAM guna menjaga keterjangkauan tarif layanan publik, sementara belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing mencapai 5,64 persen dan 5,96 persen untuk mendukung organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan program bantuan langsung kepada masyarakat.

4.4.2 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur belanja daerah, berikut disajikan perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal:

Tabel 4.5 Perbandingan Belanja Operasi Modal Tahun 2024

BELANJA DAERAH	REALISASI (Rp)	PROPORSI (%)	KATEGORI
Belanja Operasi	58.623.935.516.823	84,20%	Konsumtif
Belanja Modal	11.004.785.255.543	15,80%	Produktif/Investasi
TOTAL	69.628.720.772.366	100%	

Sumber: Data LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (diolah) Jakarta (2025)

Perbandingan di atas menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antara belanja yang bersifat konsumtif (belanja operasi) dengan belanja yang bersifat produktif atau investasi (belanja modal). Dengan rasio 84:16, struktur belanja DKI Jakarta lebih condong pada pembiayaan kegiatan operasional rutin dibandingkan investasi pembangunan infrastruktur jangka panjang.

4.4.3 Interpretasi dan Implikasi Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi sebesar 84,20 persen yang termasuk kategori kurang baik memberikan beberapa implikasi penting bagi pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan jangka panjang.

- **Keterbatasan Investasi Infrastruktur**

Dengan hanya 15,80 persen anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal, kapasitas pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur menjadi terbatas. Padahal, investasi infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Keterbatasan investasi infrastruktur dalam jangka panjang dapat menghambat pembangunan daerah dan mengurangi daya tarik investasi swasta.

- **Dominasi Belanja Rutin**

Tingginya proporsi belanja operasi mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran habis untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa operasional, serta program-program yang bersifat konsumtif. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program inovatif dan investasi jangka panjang yang dapat memberikan *multiplier effect* lebih besar bagi perekonomian daerah.

- **Beban Fiskal yang Tinggi**

Besarnya belanja operasi, terutama untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa, menciptakan beban fiskal yang tinggi dan bersifat *rigid* (sulit dikurangi). Belanja pegawai merupakan *fixed cost* yang harus dibayarkan secara rutin setiap bulan, sementara belanja barang dan jasa untuk operasional pemerintahan juga sulit dikurangi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk melakukan ekspansi program atau investasi baru.

- **Tantangan Kemandirian Fiskal**

Struktur belanja yang didominasi oleh belanja operasi menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada pendapatan rutin untuk membiayai operasional pemerintahan. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah ketika terjadi penurunan pendapatan daerah, misalnya akibat perlambatan ekonomi atau perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu melakukan restrukturisasi belanja dengan mengurangi belanja operasional yang kurang produktif dan meningkatkan alokasi untuk investasi yang dapat menghasilkan pendapatan di masa mendatang.

- **Implikasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan**

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, struktur belanja yang terlalu condong pada belanja operasi kurang ideal karena tidak menciptakan aset dan infrastruktur yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini (melalui belanja operasi) dengan investasi untuk masa depan (melalui belanja modal). Ketimpangan yang terlalu besar dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

4.4.4 Perbandingan dengan Standar Ideal

Berdasarkan literatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah, struktur belanja yang ideal adalah ketika rasio belanja operasi berada di bawah 60 persen, sehingga tersedia minimal 40 persen anggaran untuk belanja modal. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan optimal antara pembiayaan operasional rutin dengan investasi pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan membandingkan kondisi aktual DKI Jakarta tahun 2024 terhadap standar ideal, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Rasio belanja operasi DKI Jakarta mencapai 84,20 persen, melampaui standar ideal sebesar 24,20 persen (84,20% - 60%). Sementara itu, alokasi belanja modal hanya mencapai 15,80 persen, jauh di bawah standar ideal minimal 40 persen dengan selisih defisit sebesar 24,20 persen.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa struktur belanja DKI Jakarta masih terlalu berorientasi pada pembiayaan kegiatan operasional dan belum optimal dalam mendorong investasi infrastruktur. Untuk mencapai struktur belanja yang ideal, pemerintah daerah perlu melakukan restrukturisasi bertahap dengan target menurunkan rasio belanja operasi menjadi 70-75 persen dalam 3 tahun ke depan, dan secara bertahap menuju target ideal 60 persen dalam jangka menengah. Hal ini dapat dicapai melalui efisiensi belanja pegawai, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta realokasi anggaran untuk meningkatkan porsi belanja modal yang dapat menciptakan aset produktif dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Analisis Varians Belanja:** Seluruh kategori belanja menunjukkan varians menguntungkan *favorable variance* dengan total varians sebesar Rp6,01 triliun atau 7,94 persen dari total anggaran. Belanja modal mengalami varians tertinggi sebesar 15,28 persen, mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur seperti keterlambatan proses tender, perubahan desain, dan masalah perizinan. Sementara belanja operasi menunjukkan varians 4,34 persen yang relatif terkendali, dan belanja tak terduga tidak terealisasi sama sekali yang mengindikasikan kondisi daerah yang kondusif sepanjang tahun 2024.

2. **Tingkat Penyerapan Anggaran:** Penyerapan anggaran belanja daerah mencapai 92,06 persen, termasuk kategori Sangat Baik. Belanja operasi mencatat penyerapan 95,66 persen (sangat baik), sementara belanja modal hanya 84,72 persen (baik). Penyerapan belanja modal yang lebih rendah disebabkan kompleksitas pengadaan, kendala teknis pelaksanaan proyek, dan keterbatasan kapasitas kontraktor.

3. **Rasio Belanja Operasi:** Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah mencapai 84,20 persen, termasuk kategori Kurang Baik. Struktur belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa (45,32%) dan belanja pegawai (32,74%), sementara belanja modal hanya 15,80 persen. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan investasi infrastruktur, dominasi belanja rutin yang rigid, dan tantangan kemandirian fiskal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

4. **Perbandingan dengan Standar Ideal:** Struktur belanja DKI Jakarta tahun 2024 belum mencapai kondisi ideal dimana rasio belanja operasi seharusnya berada di bawah 60 persen agar tersedia minimal 40 persen anggaran untuk investasi pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Dengan rasio belanja operasi aktual sebesar 84,20 persen, terdapat selisih 24,20 persen dari standar ideal, yang mengindikasikan perlunya restrukturisasi alokasi anggaran untuk meningkatkan proporsi belanja produktif dan mengurangi ketergantungan pada belanja konsumtif yang tidak menciptakan aset jangka panjang.

Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang cukup baik dari sisi penyerapan anggaran, namun struktur belanja yang terlalu condong pada belanja operasi mengindikasikan perlunya restrukturisasi alokasi anggaran untuk meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur jangka panjang.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. **Restrukturisasi Komposisi Belanja:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja dengan target menurunkan rasio belanja operasi menjadi maksimal 70-75 persen dalam 3-5 tahun ke depan melalui efisiensi belanja pegawai, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta realokasi anggaran untuk meningkatkan porsi belanja modal minimal menjadi 25-30 persen guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing daerah.

2. **Perbaikan Sistem Pengadaan dan Pelaksanaan Belanja Modal:** Mempercepat proses tender dan pengadaan dengan menerapkan *e-procurement* yang lebih efektif, memperkuat koordinasi antar-SKPD dalam perencanaan proyek multiyears, menyelesaikan masalah lahan dan perizinan sejak tahap perencanaan, serta meningkatkan kapasitas pengawasan pelaksanaan proyek untuk mengurangi varians belanja modal yang mencapai 15,28 persen.

3. **Penguatan Perencanaan Anggaran:** Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melibatkan data historis realisasi, analisis prediktif kebutuhan riil, dan mekanisme konsultasi publik yang lebih intensif, serta menerapkan *reward system* bagi SKPD dengan kinerja penyerapan dan pencapaian output terbaik untuk mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Melakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan kinerja belanja daerah DKI Jakarta dengan Provinsi-provinsi besar lainnya untuk mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadopsi.
2. Mengembangkan penelitian dengan menambahkan analisis dampak belanja terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, tidak hanya fokus pada aspek penyerapan anggaran.
3. Melakukan studi longitudinal untuk melihat tren perubahan struktur belanja dalam periode 5-10 tahun guna mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan fiskal daerah secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rachman, Yochanan, A. I. S. (2024). *Dan R & D. In CV Saba Jaya Publishr.*
- Dara Gendis, W. (2021). *ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG PERIODE 2016-2020.* 6.
- Digdowiseiso, S. I. K. (2023). *Analisis kinerja anggaran realisasi pendapatan dan belanja daerah.* 10(2), 743-759.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2024). *Buku Ajar Buku Ajar.*
- Halim, A. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah.* Selemba Empat.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi.*
- Jakarta, P. P. D. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.* <https://ppid.jakarta.go.id/detail/laporan-keuangan-pemda-prov-dki-jakarta>
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Sopannah, A., Bahri, M., & Prabowo, H. (2023). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.*
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 170-177. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>
- Utomo, M. A. S. (2015). Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta. *Jraa*, 2(3), 15-52.